

BAB III

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan menyajikan hasil penelitian berdasarkan jawaban hasil wawancara dengan para informan atau narasumber di lapangan mengenai analisis peran aktor dalam formulasi kebijakan Semarang *Smart City*.

Data hasil penelitian disajikan dengan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam bab ini data yang disajikan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang disajikan di dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara. Data sekunder yang disajikan sendiri berupa data dokumen yang bersumber dari Keputusan Walikota Semarang Nomor 100/495 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Semarang *Smart City*, dan *Masterplan Smart City* Kota Semarang.

Data hasil penelitian yang diperoleh merupakan data kata-kata atau informasi hasil wawancara mendalam mengenai peran aktor dalam formulasi kebijakan Semarang *Smart City*. Data-data tersebut tidak berupa angka karena penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif untuk dianalisis agar mampu menjawab aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan, memetakan tingkat kekuatan dan ketertarikan antar aktor, memahami isu yang menjadi fokus utama masing-masing aktor, dan memahami besaran kontribusi; legitimasi; kemauan untuk terlibat; pengaruh; dan derajat keperluan untuk terlibat dalam proses formulasi kebijakan Semarang *Smart City*.

3.1 Profil Informan

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan terpilih yang dipilih berdasarkan kemampuan dan pengetahuan informan mengenai permasalahan yang diteliti. Informan tersebut antara lain meliputi:

1. Informan 1

Nama : Lutfi Eko Nugroho, S.T.

Jabatan : Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik
Prasarana dan Lingkungan Bappeda Kota Semarang

2. Informan 2

Nama : Sugiharto

Jabatan : Kasi Layanan Manajemen Data Diskominfo Kota Semarang

3. Informan 3

Nama : Arief

Jabatan : Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Diskominfo
Kota Semarang

4. Informan 4

Nama : Abu Salam, M.Kom

Jabatan : *Manager of Software Development* PT. Dian Nuswantoro
Teknologi dan Informasi

5. Informan 5

Nama : Retno Susanti

Jabatan : Akademisi Semarang *Smart City* dan Dosen Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro

3.2 Semarang *Smart City*

Perkotaan memiliki segudang masalah yang harus dihadapi dalam perkembangannya. Sebut saja masalah-masalah yang umum terjadi di Kota Semarang, seperti banjir, kebakaran, kriminalitas, kependudukan, transportasi, dan lainnya. Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis *Smart City* telah menjadi tren pembangunan kota di dunia dan harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia khususnya di Kota Semarang. Pembangunan *Smart City* tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung.

Kota Semarang dibawah kepemimpinan Walikota Hendrar Prihadi membentuk sebuah tagline bernama Semarang Hebat. Sesuai dengan visinya, Kota Semarang membutuhkan gerakan bersama untuk menjadikan kota cerdas dan hebat. Untuk mewujudkan Semarang *Smart City* harus bergerak bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Semarang. Oleh karenanya, pada tahun 2017 Walikota Semarang menetapkan Keputusan Walikota Semarang Nomor

100/495 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Semarang *Smart City*, dengan hasil sesuai tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1
Tim Pengembangan Semarang *Smart City*

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Wakil Walikota Semarang	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Ketua
5	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
6	Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
7	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
8	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Sekretaris
9	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
17	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
18	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
19	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota
20	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
21	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota

22	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
23	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
24	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota

Sumber: Keputusan Walikota Semarang Nomor 100/495 Tahun 2017

Berdasarkan tabel tersebut, kedudukan seluruh Kepala Dinas Kota Semarang kecuali Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang bertindak sebagai anggota tim pengembangan Semarang *Smart City*. Mereka dikepalai oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang, dengan dibantu oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang, Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang, dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagai wakil ketua. Selanjutnya Walikota Semarang dan Wakil Walikota Semarang sebagai pengarah dan wakil pengarah dalam pengembangan Semarang *Smart City*.

3.3 Identifikasi Aktor yang Terlibat Dalam Perumusan Kebijakan Semarang *Smart City*

Formulasi kebijakan merupakan sebuah proses awal dalam sebuah kebijakan. Formulasi kebijakan adalah inti dari kebijakan publik karena pada tahap ini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Pembuat kebijakan seringkali disebut sebagai aktor formulasi kebijakan. Aktor formulasi adalah orang-orang maupun kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu proses perumusan kebijakan publik dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Anggara (2004) menyebutkan, aktor formulasi kebijakan berasal dari tiga unsur, yaitu pemerintah sebagai aktor *state*, swasta sebagai aktor *private*, dan masyarakat sebagai aktor *society*.

Commented [T1]: Ini emang ..suatu proses kebijakan publik Atau seharusnya ada kata perumusan di antara proses dan kebijakan?

Jika berbicara mengenai pemerintah sebagai aktor formulasi kebijakan, Informan 2 selaku Kasi Layanan Manajemen Data Diskominfo Kota Semarang menjelaskan

“Terkait dengan aktor pemerintah dalam Smart City ini mas, saya rasa seluruh OPD yang ada di Kota Semarang terlibat dalam Smart City, baik langsung maupun tidak langsung dalam urusan peraturan. Sebagai contoh, jika mas melihat Keputusan Walikota Semarang Nomor 100/495 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Semarang Smart City yang ini mas, ini kan semua Dinas Kota Semarang terlibat langsung, cuma Diskominfo yang bertindak sebagai sekretaris tapi yang lainnya sebagai anggota. Lalu untuk yang terlibat tidak langsung, bahkan kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Semarang juga sudah terlibat. Mereka sekarang menggunakan aplikasi pengisian buku administrasi kelurahan. Jadi selama ini kalau kita lihat, di tingkat kelurahan itu banyak buku-buku administrasi yang harus diisi oleh petugas kelurahan, nah ini kita fasilitasi kita buat dalam bentuk aplikasi. Jadi jika sewaktu waktu kita butuh datanya, data akan tersaji secara lebih cepat dan lebih akurat” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh Lutfi Eko Nugroho selaku Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan Bappeda Kota Semarang berikut:

”Aktor pemerintah semuanya terlibat. Bappeda sebagai ketua tim selalu berkoordinasi terhadap seluruh anggota tim. Semua dinas di lingkungan Kota Semarang berkoordinasi dan terlibat dengan baik dengan Bappeda. Bahkan baru kemarin kami juga mengadakan FGD dengan Pak Nana Kepala Diskominfo dan juga OPD lainnya” (Hasil wawancara tanggal 23 Juli 2018)

Berdasarkan penggalan kedua wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh dinas di Kota Semarang terlibat secara langsung dalam perumusan kebijakan Semarang *Smart City*. Namun jika dilihat dari jumlah dinas yang ada di Kota Semarang, ternyata ada sepuluh dinas di Kota Semarang yang tidak terlibat sebagai anggota tim pengembangan Semarang *Smart City*. Dinas-dinas tersebut yaitu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang; Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Semarang; Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang; Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang; Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang; Dinas Perdagangan Kota Semarang; Dinas Perikanan Kota Semarang; Dinas Perindustrian Kota Semarang; dan Dinas Pertanian Kota Semarang.

Ketika dikonfirmasi kembali kepada Diskominfo Kota Semarang, dalam hal ini Informan 2 selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Diskominfo Kota Semarang menyebutkan

“Wah kalau hal itu kurang tau ya mas, Diskominfo kebetulan juga hanya bertindak sebagai sekretaris. Mungkin bisa ditanyakan kepada Bappeda atau Sekda Kota Semarang terkait hal tersebut” (Hasil wawancara tanggal 25 Juli 2018)

Kemudian Informan 1 selaku Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan Bappeda Kota Semarang memberikan keterangan sebagai berikut

“Mengenai hal tersebut, saya pribadi kurang mengetahui secara jelas. Namun jika melihat struktur keanggotaan tim, bisa jadi keberadaannya sudah terwakilkan oleh Asisten-Asisten Sekda (Kota Semarang) sebagai wakil ketua tim. Bisa jadi juga mereka merupakan dinas yang tidak terlalu menggunakan teknologi IT sehingga dirasa tidak diperlukan dalam perumusan kebijakannya. Namun saya rasa alasan pertama tadi yang paling masuk akal.” (Hasil wawancara tanggal 25 Juli 2018)

Selanjutnya berbicara mengenai swasta sebagai aktor perumusan kebijakan, Informan 2 selaku Sugiharto selaku Kasi Layanan Manajemen Data Diskominfo Kota Semarang menjelaskan

“Selama ini, terkait dengan Smart City ya kita dengan Dinustek. Dinustek merupakan perusahaan yang dibentuk oleh Udinus, tapi ya selama ini dia yang membackup mengenai implementasi Smart City yang ada di Semarang. Telkom dia juga membantu untuk kerjasama infrastrukturnya, dalam hal ini khususnya kayak FO (fiberoptik). Kalau dari swasta, hanya

baru dua itu. Terus kalau PLN dalam bentuk dia memberikan bantuan berupa barang. Tapi sifatnya hanya situasional saja, sekali bantu ya sudah selesai. Yang selalu bantu ya Dinustek dengan Telkom.” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2018)

Hal tersebut senada dengan penjelasan Informan 1 selaku Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan Bappeda Kota Semarang sebagai berikut

“Kalau untuk partner swasta tidak banyak sih mas. Yang lebih tau pastinya itu Diskominfo karena mereka yang berkontak secara langsung. Tapi sepengetahuan saya, Dinustek dan Telkom terlibat mas” (Hasil wawancara tanggal 23 Juli 2018)

Berdasarkan kedua wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinustek yang berada dibawah naungan Universitas Dian Nuswantoro Semarang dan Telkom Kota Semarang merupakan partner swasta yang dilibatkan dalam kebijakan Semarang *Smart City*. Hal tersebut diamini oleh Informan 4 m selaku *Manager of Software Department* Dinustek sebagai berikut

“Betul, kita sering dilibatkan oleh pemerintah terutama Diskominfo Kota Semarang dalam Smart City. Bahkan karena hal tersebut, kita juga Alhamdulillah dipercaya sebagai partner dari Kabupaten Batang dan Kabupaten Rembang. Mereka (Kabupaten Batang dan Kabupaten Rembang) percaya kita mampu mengembangkan aplikasi yang berguna untuk urusan mereka”. (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2018)

Selanjutnya berbicara mengenai posisi masyarakat sebagai aktor formulasi kebijakan, Informan 2 selaku Kasi Layanan Manajemen Data Diskominfo Kota Semarang menjelaskan

“Saya rasa masyarakat tidak terlibat secara langsung ya mas. Paling hanya akademisi. Bahkan LSM pun ngga ada tuh mas yang ikut, karena masyarakat hanya dalam posisi sebagai pengguna kebijakan.” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2018)

Senada dengan pernyataan Informan 2 tersebut, Informan 1 selaku Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan Bappeda Kota Semarang memberikan keterangan sebagai berikut

“Ya betul mas yang dikatakan Pak Sugihato tersebut. Masyarakat secara umum adalah target dari Smart City itu sendiri. Meskipun begitu, kita sering mas mengundang akademisi, misalnya dari Dosen PWK Undip. Bu Retno namanya mas. Beliau sering kita undang untuk memberikan pengertian dan pandangan terkait Smart City di FGD yang kita adakan” (Hasil wawancara tanggal 23 Juli 2018).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktor yang terlibat dalam kebijakan Semarang *Smart City* hanya pemerintah sebagai aktor *state*. Swasta sebagai aktor *private*, dan masyarakat sebagai aktor *society* tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan Semarang *Smart City*.

Dalam konteks *state*, aktor yang terlibat Walikota Semarang; Wakil Walikota Semarang; Sekretaris Daerah Kota Semarang; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang; Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang; Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Semarang; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang; Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang; Dinas Penataan Ruang Kota Semarang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang; Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang; Dinas Perhubungan Kota Semarang; Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang; Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang; Dinas Sosial Kota Semarang; Dinas Pendidikan Kota Semarang; Dinas Kesehatan Kota Semarang; dan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Kemudian dalam konteks *private*, aktor yang terlibat adalah PT Dian Nuswantoro Teknologi dan Informasi (Dinustek), Telkom Semarang, dan PLN. Selanjutnya, Pemerintah Kota Semarang seringkali menggunakan jasa akademisi guna memberikan pandangan *Smart City* Kota Semarang. Akademisi yang dimaksud seringkali berasal dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, dalam hal ini Informan 5 yang juga berperan sebagai narasumber kelima. Sehingga kehadiran akademisi tersebut dapat digolongkan ke dalam konteks *private*. Kemudian dalam konteks *society*, Pemerintah Kota Semarang mengakui peran masyarakat sangat dibatasi dalam konteks perumusan kebijakan. Dalam kebijakan Semarang *Smart City*, keterlibatan masyarakat hanya sebagai pengguna kebijakan.

3.4 Analisis Peran yang Dilakukan Oleh Aktor Kebijakan

Peran merupakan sebuah interaksi sosial dalam masyarakat yang menggambarkan harapan-harapan yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dimensi kebijakan publik, para aktor dituntut untuk memainkan perilaku yang sesuai dengan peran yang dimilikinya.

Dalam menganalisis peran, terdapat empat fenomena yang dapat dilihat, yaitu

1. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Pada poin pertama, orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial sesuai dengan poin 3.3 sebelumnya, yaitu identifikasi aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan Semarang *Smart City*.

Pada poin kedua, yaitu perilaku yang muncul dalam interaksi perumusan kebijakan Semarang *Smart City*, Informan 2 selaku selaku Kasi Layanan Manajemen Data Diskominfo Kota Semarang menjelaskan

“Terkait dengan perilaku yang muncul, Pak Walikota bersama dengan Pak Wakil Walikota, dalam hal ini pimpinan atau yang berada dalam Top Manager, memang mengharuskan bahwa Smart City harus berjalan, berarti kita harus mendukung dan melaksanakan. Terkait dengan mindset wajar, namanya transisi dari manual menjadi elektronik. Bisa diambil contoh melalui salah satu program kita yaitu e-surat. Selama ini yang dipermasalahkan terkait dengan perintah untuk membuat surat atau undangan, yang sifatnya mendadak, sebelumnya banyak ditemukan kasus bahwa kurir atau yang mengantarkan surat tidak ada, atau yang didisposisikan sedang ke luar kota. Dengan menggunakan e-surat, hal tersebut sudah tidak menjadi alasan lagi, karena surat yang dibuat akan segera disebarkan kepada yang bersangkutan, sehingga konsekuensinya adalah para pejabat seharusnya tidak boleh gagap teknologi. Aplikasi tersebut juga memiliki notifikasi, jika terdapat surat yang ditujukan kepada pejabat terkait, maka pejabat tersebut akan mendapatkan sebuah notifikasi dan harus segera merespon. Pada awalnya pejabat merasa kesulitan menggunakan sistem tersebut, namun lama kelamaan mulai lancar menggunakan aplikasi tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2018)

Senada dengan pernyataan tersebut, Informan 1 selaku Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan Bappeda Kota Semarang memberikan pernyataan sebagai berikut

“Saya rasa masing-masing aktor memiliki perilakunya masing-masing ya. Jadi Bappeda sebagai ketua tim itu perilakunya adalah mengkoordinasikan OPD terkait dalam pelaksanaan Smart City. Misal Diskominfo, jadi dari Bappeda itu mengkoordinasikan Diskominfo untuk membuat program dan

kajian yang lebih terfokus pada penggunaan teknologi misanya. Dan karena masing-masing OPD sudah memiliki tupoksinya, jadi lebih mudah.” (Hasil wawancara tanggal 23 Juli 2018)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah sebagai salah satu aktor kebijakan melakukan sebuah interaksi. Dalam hal ini, bentuk interaksi yang dilakukan adalah adanya komando dan koordinasi dari Walikota dan Wakil Walikota Semarang sebagai *top manager* terhadap seluruh OPD di lingkungan Kota Semarang. Selain itu, interaksi lain juga ditunjukkan oleh adanya koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Kota Semarang terhadap OPD sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sehingga, perilaku yang muncul jika melihat dari sudut pandang *state* adalah adanya tindakan sosial berupa arahan, komando, maupun koordinasi sehingga seluruh aktor yang terkait menjalankan tugas sesuai perannya masing-masing.

Dalam sudut pandang *private*, Informan 4 Salam selaku *Manager of Software Development* PT. Dian Nuswantoro Teknologi dan Informasi (Dinustek) memberikan pernyataan berikut

“Kami hanya menunggu arahan dan perintah dari pemerintah mas. Karena kita lebih sering bekerja sama dengan Diskominfo, jadi kita sering berkontak dengan Diskominfo, jadi kita menunggu Diskominfo pesan apa. Kalau minta dibuatkan aplikasi, ya kita buat kan tentunya dengan MOU (memorandum of understanding) ya mas. Kalau untuk urusan perumusan kebijakan sih kita cuma hadir saat penyampaian sudut pandang swasta seperti apa baiknya Smart City nanti. Terutama ketika Dinustek bergerak di bidang TI, kita dimintai pendapat tentang TI.” (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara dengan Informan 4 tersebut, perilaku yang muncul jika melihat melalui sudut pandang *private* adalah adanya kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Semarang sebagai aktor *state* dengan Dinustek

sebagai aktor *private*. Menurut Sargent (Santoso, 2010:191), kerja sama adalah usaha yang dikoordinasikan yang ditujukan kepada tujuan yang dapat dipisahkan. Pengertian ini memperkuat pandangan bahwa kerja sama sebagai akibat kurang mampunya individu untuk memenuhi kebutuhan dengan usaha sendiri sehingga individu yang bersangkutan memerlukan bantuan individu lain. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang positif, dimana dibutuhkan rasa saling memahami dan kekompakan dalam melakukan sebuah kerja sama.

Bentuk perilaku lain yang muncul akibat adanya interaksi sosial diperlihatkan oleh masyarakat sebagai aktor *society*. Informan 2 selaku selaku Kasi Layanan Manajemen Data Diskominfo Kota Semarang menjelaskan

“Pemerintah hanya memposisikan masyarakat luas sebagai pengguna kebijakan, dalam hal ini kita sering memberi kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk mengadu secara langsung kepada pemerintah, misalnya melalui Lapor Hendi maupun sms ke nomor 1708” (Hasil wawancara tanggal 2 Oktober 2018)

Melihat petikan wawancara tersebut, pemerintah sebagai aktor *state* hanya memberikan aplikasi-aplikasi kepada masyarakat sebagai aktor *society*. Aplikasi-aplikasi tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinteraksi kepada pemerintah, sehingga masyarakat akan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut sehingga muncul akomodasi dari masyarakat sebagai bentuk perilaku sosial. Sargent (dalam Santoso, 2010:195) mengemukakan bahwa penyesuaian adalah suatu proses peningkatan untuk saling beradaptasi. Penyesuaian itu sangat penting untuk disadari dan dilakukan dalam sebuah interaksi agar interaksi dapat berjalan dengan baik dengan adanya rasa saling pengertian dan

memahami serta menimbulkan suatu kerja sama yang baik antarindividu maupun antarkelompok.

Pada poin ketiga, yaitu kedudukan orang-orang dalam perilaku perumusan kebijakan Semarang *Smart City*, Informan 2 selaku Kasi Layanan Manajemen Data Diskominfo Kota Semarang menjelaskan sebagai berikut

“Kedudukannya sesuai di Keputusan Walikota tersebut mas. Kalau swasta lebih sering sebagai partner kita. Akademisi pun begitu. Kalau masyarakat umum ya tadi, sebagai pengguna kebijakan saja. Sebagai target kebijakan lah mas.” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2018)

Kutipan tersebut diamini oleh Informan 1 selaku Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan Bappeda Kota Semarang dengan memberikan pernyataan sebagai berikut

“Kedudukan sih lihat di Perwalnya (Keputusan Walikota Semarang Nomor 100/495 Tahun 2017) ya. Kalau yang anggota ya sebagai anggota, Bappeda sebagai ketua tim, Diskominfo sebagai sekretaris. Kalau swasta dan masyarakat mungkin dalam hal ini sebagai target kebijakan” (Hasil wawancara tanggal 23 Juli 2018)

Berdasarkan kedua wawancara di atas, kedudukan masing-masing aktor dalam perumusan kebijakan Semarang *Smart City* ditentukan oleh pemerintah sebagai aktor *state*. Dalam arti lain, kedudukan yang muncul bersifat mengikat dan satu arah, tidak ditentukan melalui mekanisme pasar yang bebas. Kedudukan *private* dan *society* sangat bergantung terhadap keputusan *state*. Dalam hal ini, *private* dan *society* hanya memiliki kedudukan sebagai partner dan target kebijakan Semarang *Smart City*.

Poin terakhir berbicara mengenai kaitan antara orang dengan perilaku yang muncul. Informan 2 selaku Kasi Layanan Manajemen Data Diskominfo Kota Semarang menjelaskan sebagai berikut

“Ya tadi mas, kalau top manager ya memberikan arahan. Kalau pemerintah ya berkoordinasi dengan seluruh OPD di lingkungan Kota Semarang. Swasta dan masyarakat karena mereka sebagai partner pemerintah, mereka mendukung penuh Smart City ini.” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2018)

Informan 2 selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Diskominfo Kota Semarang juga memberikan pendapat sebagai berikut

“Saya rasa bisa dilihat dari peran dan tupoksinya ya mas. Contohnya adalah Diskominfo berkedudukan sebagai sekretaris tim pengembangan. Jadi Diskominfo membantu Bappeda dalam hal pembuatan kebijakan dan pelaksanaan programnya” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2018)

Senada dengan hal tersebut, Informan 1 selaku Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan Bappeda Kota Semarang dengan memberikan pernyataan yaitu

“Kaitan mengenai kita dan orang yang muncul yaitu kita (Bappeda Kota Semarang) sering ya mengadakan FGD, mengadakan pelatihan, berkoordinasi dengan OPD terkait. Kalau untuk swasta dan masyarakat ya mereka menerima Smart City dengan baik lah mas.” (Hasil wawancara tanggal 23 Juli 2018)

Dengan demikian, Pemerintah Kota Semarang sebagai aktor *state* menjelaskan bahwa perilaku yang muncul akan sesuai dengan tupoksi dan kedudukan masing-masing aktor kebijakan. Hal ini sudah diatur secara resmi melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 100/495 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Semarang *Smart City*. Pemerintah Kota Semarang terus mengupayakan pembangunan Semarang *Smart City* yang bersinergi antar OPD dengan berbagai cara, seperti berkoordinasi, mengadakan pelatihan guna mengembangkan SDM internal instansi, dan mengadakan FGD yang bertujuan menjalankan dan membuat peraturan yang ideal. Adapun kaitan antara *private* dan *society* sebagai aktor kebijakan dengan perilaku yang muncul,

Pemerintah Kota Semarang berharap kebijakan Semarang *Smart City* nantinya akan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari empat fenomena peran yang dilakukan oleh aktor kebijakan, masing-masing aktor baik dari unsur pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat memiliki peran dan kedudukannya masing-masing. Setiap aktor saling menjalankan perannya sehingga menimbulkan perilaku yang berbeda-beda. Namun Pemerintah Kota Semarang terus mengupayakan setiap aktor kebijakan untuk terus bersinergi agar perumusan kebijakan Semarang *Smart City* nantinya berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

3.5 Tingkat Kekuatan Aktor Kebijakan

Kekuatan yang dimiliki oleh aktor kebijakan menurut LAN (2017) dapat berasal dari potensi aktor untuk mempengaruhi kebijakan atau organisasi yang berasal dari kekuasaan berbasis kedudukan atau sumber daya mereka dalam organisasi, atau pengaruh mereka yang berasal dari kredibilitas mereka sebagai pemimpin atau seorang ahli. Dalam perumusan kebijakan Semarang *Smart City*, setiap aktor memiliki intensitas kekuatannya masing-masing, sehingga kekuatan tiap aktor tidaklah sama. Ketersediaan sumber daya dan pengolahannya seringkali menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing aktor kebijakan dalam menjalankan perannya.

Tingkat kekuatan pemerintah sebagai aktor kebijakan publik digambarkan oleh Informan 2 selaku Kasi Layanan Manajemen Data Diskominfo Kota Semarang sebagai berikut

“Terkait dengan sumber daya, seperti alat, alat tidak ada masalah. Pak Walikota memberikan perhatian khusus terkait Smart City. Ya meskipun memang untuk yang lain yang bukan Smart City bukan berarti tidak diperhatikan. Tapi untuk Smart City, khususnya untuk masalah anggaran, sangat disupport, tidak ada masalah. Namun untuk masalah sdm, karena kebetulan kompetensi kita di bidang khususnya mengenai IT terbatas, sehingga kita merekrut pegawai non ASN yang mempunyai kompetensi di bidang IT. Contohnya adalah di tingkat kelurahan, tiap kelurahan sudah menerima minimal satu tenaga IT guna meningkatkan aktivitas mereka. Dan sekarang setiap OPD bahkan hingga tingkat kecamatan di Kota Semarang memiliki sebuah website yang terintegrasi dengan website induk Kota Semarang.” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2018)

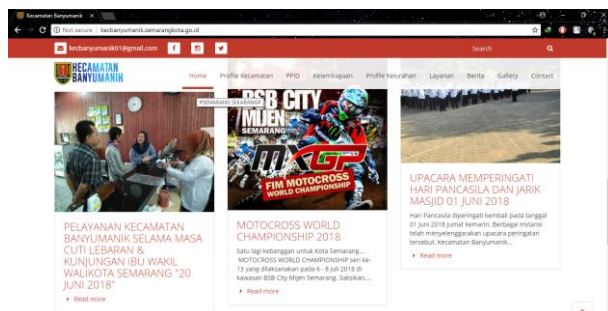
Informan 1 selaku Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan Bappeda Kota Semarang juga memberikan pendapat berikut

“Kalau mengenai sumberdaya apa saja, saya kira support dari atas hingga bawah itu yang kita miliki.” (Hasil wawancara tanggal 23 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara dengan informan menunjukkan kekuatan Pemerintah Kota Semarang terletak pada adanya dukungan teknis dan nonteknis dari semua pihak. Walikota Semarang memberikan perhatian khusus guna kelancaran pengembangan *Smart City* Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan terintegrasinya situs seluruh OPD Kota Semarang dengan situs induk Kota Semarang

Gambar 3.1

Tampilan Situs Kecamatan Banyumanik Kota Semarang



Sumber: Situs Induk Kota Semarang, 2018

Tujuan terintegrasinya situs seluruh OPD di lingkungan Kota Semarang adalah memudahkan masyarakat dalam mengakses data di Kota Semarang. Website induk Kota Semarang dengan alamat www.semarangkota.go.id ini berfungsi sebagai Jendela Informasi Semarang yang dapat digunakan oleh pemerintahan dan masyarakat umum untuk mengetahui berbagai hal yang ada di pemerintahan maupun potret kota dengan menggunakan empat bahasa, yaitu Indonesia, Jawa, Inggris, dan China.

Dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, Informan 2 selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Diskominfo Kota Semarang menyampaikan pendapat yaitu

“Kalau kita yaitu dengan menerapkan kebijakan yang sudah dibuat dan dituangkan dalam bentuk program kegiatan. Kalau dalam ranah rencana, berarti masuknya ke dalam RKA, kemudian disahkan oleh dewan dalam bentuk DPA sehingga nantinya akan menjadi program dan kegiatan. Kita tuangkan semuanya ke dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan Semarang Smart City kita melakukan breakdown dari RPJMD tersebut dengan rancangan 10i, 4k, dan 6s. 10i, 4k, dan 6s adalah 10 indikator kota cerdas (10i) melalui 4 konsep(4k) terdiri keberlanjutan, konektivitas, kreativitas dan keterpaduan sosial yang merupakan wujud

pengembangan dari 6 dimensi Smart City” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2018)

Informan 2 selaku Kasi Layanan Manajemen Data Diskominfo Kota Semarang juga memberikan pernyataan

“Dalam memanfaatkan sumberdaya, yang paling mendasar adalah adanya komunikasi dan koordinasi antar instansi yang terkait. Karena pada awal perumusan RPJMD dahulu, Pak Walikota meminta agar semua OPD saling bersinergi untuk mencapai visi misi dari beliau, dan beliau mengupayakan untuk selalu memberikan support yang terbaik.” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2018)

Pendapat berbeda datang dari unsur swasta dan masyarakat. Pada unsur swasta, Informan 4 selaku *Manager of Software Development* PT. Dian Nuswantoro Teknologi dan Informasi menyampaikan hal berikut

“Kalau dalam perumusan kebijakan kita kan tidak terlalu dilibatkan ya, jadi sumber daya kita sangat bergantung terhadap koordinasi dan perintah dari pemerintah. Dalam hal ini, kita buat aplikasi guna menunjang pemerintahan, seperti absen elektronik. Jadi semuanya bergantung terhadap pemerintah pesannya apa ke kita.” (Hasil wawancara tanggal 23 Juli 2018)

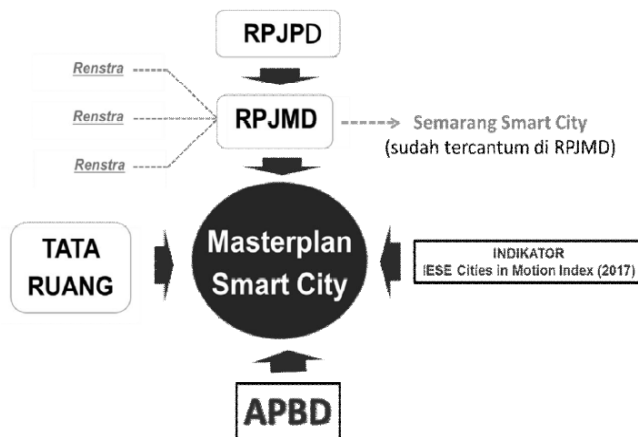
Informan 5 selaku Akademisi Semarang *Smart City* dan Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro juga mengatakan hal yang senada sebagai berikut

“Waduh kalau hal itu saya pribadi kurang tau ya mas karena tidak terlalu dilibatkan. Yang jelas, kalau ada permintaan mengisi sebagai akademisi, presentasi, atau membuat sebuah kajian ya sayaenuhi. Diluar itu, saya kurang tahu ya mas.” (Hasil wawancara tanggal 25 Juli 2018)

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki kekuatan yang besar sebagai aktor kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang yang seolah tidak terbatas. Pemerintah Kota Semarang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki

dengan memaksimalkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang. Penyusunan dokumen RPJMD Kota Semarang 2016-2021 berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Semarang tahun 2005-2025. Dokumen RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam renstra perangkat daerah dan RKPD. Pendanaan pengembangan Semarang Kota Cerdas Kota Semarang berasal dari dana APBD Kota Semarang.

Gambar 3.2
Hubungan Antar Dokumen Dalam Pengembangan Semarang *Smart City*



Sumber: Masterplan Semarang Smart City, 2018

Namun di sisi lain, Pemerintah Kota Semarang tidak terlalu melibatkan aktor lainnya dalam perumusan kebijakan Semarang *Smart City*. Interaksi yang ditimbulkan dari Pemerintah Kota Semarang kepada swasta dan masyarakat lebih bersifat perintah dan satu arah, sehingga menimbulkan kesan adanya pembatasan kekuatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap aktor lainnya.

Dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kota Semarang menemui hambatan sebagaimana disampaikan oleh Informan 2 selaku Kasi Layanan Manajemen Data Diskominfo Kota Semarang berikut

“Kalau untuk hambatan pasti ada, tetapi masih dalam batas yang wajar. Contohnya, kalau untuk dukungan anggaran, tidak ada hambatan yang signifikan. Hambatan yang paling terasa yaitu di mindset dan perilaku SDM kita. Perilaku terutama ASN menurut saya kurang melayani masyarakat saat ini. Contohnya yang tadi, mindset SDM di tingkat kelurahan yang belum memaksimalkan penggunaan IT dan belum optimalnya website di tingkat tersebut. Macem-macam alasannya, ada yang tidak paham, SDM yang terbatas. Tapi menurut saya, akar permasalahannya adalah mengubah perilaku yang tadinya manual, sekarang dituntut untuk lebih menggunakan media online tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2018)

Hambatan lain yang ditemui juga dituturkan oleh Informan 1 selaku Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan Bappeda Kota Semarang berikut

“Hambatan pasti selalu ada ya mas. Apalagi namanya Bappeda sebagai koordinator, kadang ketika rapat koordinasi dari OPD yang bersangkutan tidak ada.” (Hasil wawancara tanggal 23 Juli 2018)

Sedangkan dari pihak swasta, Informan 4 selaku Manager of Software Department Dinustek memberikan pendapat

“Karena kami swasta, bergantung pada pemerintah, kadang pemerintah minta dibuatkan aplikasi. Tetapi ketika aplikasi tersebut sudah jadi, tidak langsung dibayar. Mungkin karena persoalan pajak dan mekanisme birokrasi ya mas makanya terjadi seperti itu. Tapi pengalaman pasti dibayar sesuai kesepakatan awal dahulu.” (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas, setiap aktor memiliki hambatan masing-masing dalam menjalankan perannya. Pemerintah Kota Semarang mengakui memiliki hambatan berupa kurang terlatihnya sumber daya manusia (SDM) yang

dimiliki dalam menjalankan program-program Semarang *Smart City*. Mindset SDM yang harus berganti dari elit birokrat menjadi pelayan masyarakat sehingga menimbulkan hambatan yang berarti. Perilaku yang berubah mengikuti era digital juga turut menyumbang hambatan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program-program Semarang *Smart City*. Hal ini menjadi sebuah kontradiksi mengingat Semarang *Smart City* merupakan sebuah program pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi.

Di sisi lainnya, Dinustek sebagai partner Pemerintah Kota Semarang juga mengaku menemui hambatan. Hambatan yang ditemui lebih bersifat hambatan eksternal, karena hambatan bersumber dari Pemerintah Kota Semarang. Informan 4 mengakui sangat bergantung terhadap pemerintah untuk menjalankan kegiatan operasional Dinustek. Namun, karena faktor pajak dan mekanisme birokrasi uang yang dijanjikan tidak langsung cair dan diberikan kepada Dinustek.

3.5 Tingkat Ketertarikan Aktor Kebijakan

Setiap aktor kebijakan memiliki isu prioritasnya masing-masing. Ketertarikan (*interest*) yang dimiliki oleh aktor kebijakan menurut LAN (2017) dapat diukur melalui tingkat keaktifannya terhadap sebuah kebijakan atau proyek tertentu. Serupa dengan tingkat kekuatan aktor kebijakan, dalam perumusan kebijakan Semarang *Smart City* memiliki intensitas ketertarikan yang berbeda-beda. Bisa karena kewenangan yang berbeda, maupun isu prioritas yang berbeda.

Tingkat ketertarikan Pemerintah Kota Semarang terhadap Semarang *Smart City* dituturkan oleh Informan 2 selaku Kasi Layanan Manajemen Data Diskominfo Kota Semarang berikut

“Isu prioritas masing-masing aktor berbeda-beda. Bisa dilihat di masterplan Semarang Smart City, setiap dinas memiliki isu prioritasnya sendiri.” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2018)

Senada dengan hal tersebut, Informan 1 selaku Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan Bappeda Kota Semarang memiliki pendapat

“Saya rasa isu prioritas masing-masing aktor sesuai dengan tupoksinya masing-masing, yang jelas kita semua harus saling bersinergi dalam menyusun dan menjalankan Smart City ini. Dalam jangka pendek, Smart City juga memiliki program quick wins yang harus dilaksanakan” (Hasil wawancara tanggal 23 Juli 2018)

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang mengaku bahwa setiap OPD memiliki isu prioritas yang berbeda-beda. Isu prioritas masing-masing OPD Kota Semarang sudah diatur dalam masing-masing tupoksinya. Program *quick wins* dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan pembangunan Kota Semarang.

Tabel 3.2**Program Quick Wins Semarang Smart City**

No	Bentuk	Quick Win	OPD
1	<i>Smart Governance</i>	Integrasi SIM perencanaan-keuangan-monev-pelaporan	Semua OPD
2	<i>Smart Branding</i>	Pemandu lokasi berbasis <i>smartphone</i> “Semarang dalam genggamannya”	DISBUDPAR, DISKOMINFO, Bag. TAPEM, Bag. Ekonomi, DISDIK, DINKES, Bag. KESRA, BAPPEDA
3	<i>Smart Economy</i>	Pemberian kredit wibawa : tanpa agunan bagi UKM	Pd bank pasar, dinkopukm, bag. Ekonomi, disperin, Dindag
4	<i>Smart Living</i>	Info listrik padam dan hidup serta penyebabnya di Wilayah Semarang	DISTARU, DISPERKIM, DISKOMINFO, DPU
5	<i>Smart Society</i>	Pusat layanan informasi publik, 3 layanan dalam 1 atap	Semua OPD
6	<i>Smart Environment</i>	Penggunaan energy rumah tangga dan warung makan dari sampah	DISPERKIM, DLH, BAPPEDA, DISTARU, DPU

Sumber: Masterplan Semarang Smart City, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa seluruh OPD Kota Semarang saling bersinergi dalam menjalankan program jangka pendek (quick wins) Semarang *Smart City*. Berdasarkan 10 target pencapaian indikator Semarang *Smart City* tersebut, hasil skor Program Prioritas Walikota dengan skor terbesar yaitu Indeks Reformasi Birokrasi menjadi isu prioritas Pemerintah Kota Semarang dengan skor 41. Sesuai dengan tabel 3.2 di atas, Integrasi SIM perencanaan-keuangan-monev-pelaporan dalam dimensi *Smart Governance*

Commented [T2]: diatas tabelnya 3.2 btw

menjadi program yang melibatkan semua OPD Kota Semarang. Hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang baik dalam tata kelola pemerintahannya.

Sedangkan dalam ranah swasta dan masyarakat, Informan 4 selaku *Manager of Software Department* Dinustek memberikan pendapat

“Kalau harus dipilih, mungkin lebih ke Smart Governance ya mas” (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2018)

Sedangkan Informan 5 selaku akademisi Semarang *Smart City* dan dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro memberikan pernyataan berikut

“Saya rasa fokus utamanya adalah Smart Governance ya kalau di Kota Semarang ini” (Hasil wawancara tanggal 25 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara tersebut, aktor *private* dan *society* yang diwakilkan oleh informan 4 dan 5 mengakui bahwa fokus pengembangan Semarang *Smart City* adalah pembenahan birokrasi melalui program-program yang ada di dimensi *Smart Governance*. Meskipun begitu, bukan berarti dimensi lainnya tidak diperhatikan. Reformasi Birokrasi merupakan isu prioritas Kota Semarang sehingga Pemerintah Kota Semarang menanggapi isu tersebut diperhatikan terlebih dahulu dibandingkan dengan isu lainnya.

3.6 Pemetaan Orientasi Nilai Aktor

Dalam memahami orientasi nilai masing-masing aktor, terdapat tiga variable yang dapat digunakan, yaitu kontribusi, kemauan untuk terlibat (*willingness to engage*),

dan keperluan untuk terlibat (*necessity of involvement*). Masing-masing variable tersebut tidak dapat dipisahkan dalam menganalisis orientasi nilai masing-masing aktor.

Dalam konteks kontribusi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang, Informan 2 selaku Kasi Layanan Manajemen Data Diskominfo Kota Semarang memberikan pendapat berikut

“Kalau kontribusi saya pikir sesuai dengan perannya masing-masing. Ada yang berkontribusi dalam hal user atau pengguna dari manfaat Smart City. Tapi ada juga yang berkontribusi sebagai pembuat. Contohnya dinas perdagangan, kemarin mereka membuat aplikasi yang namanya e-retribusi, jadi kapasitas mereka sebagai pembuat. Nah sementara untuk usernya yaitu pedagang-pedagang. Nah pada awalnya, kita orientasinya itu kan ke pelayanan publik ya. Pelayanan publik itu kan ada tiga, yaitu dari pemerintah ke pemerintah, dari pemerintah ke masyarakat, dan dari pemerintah ke dunia usaha atau swasta. Kalau dari pemerintah ke pemerintah ya itu tadi, jadi aplikasi yang dibuat baik oleh diskominfo ataupun skpd lain, itu digunakan untuk kebutuhan internal pemerintah kota. Kan banyak itu, contohnya aplikasi simpeda atau sistem manajemen perencanaan daerah itu produknya bappeda, ada yang namanya simbada, itu mengenai manajemen pengelolaan barang dan aset daerah, itu di bpkd. Terus kalau dari pemerintah ke masyarakat, yaitu misalnya masyarakat lapor, terus kita ada call center, call center kan hanya ada di diskominfo, tapi hanya bersifat kegawatdaruratan saja. Kayak ada kejadian misalnya kebakaran, masyarakat melapor ke call center 112, lalu kita teruskan ke instansi yang menangani. Misalnya terjadi kasus pencurian, jadi dari hp cukup 112 masuk ke operator lalu operator meneruskan ke instansi yang berwenang menangani. Itu kan juga termasuk bagian dari Smart City juga.” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2018)

Pendapat lain diberikan oleh Informan 3 sebagai berikut

“Kalau faktor pendorong terutama dari proses kontribusi ya itu tadi terutama, yaitu adanya keharusan atau tuntutan, dari masing-masing upd yang ada di pemerintah kota dia harus mendukung penuh mengenai implementasi pengembangan Smart City, karena itu sudah jadi keinginan dari pimpinan, bahwa semarang itu terkait Smart City harus tampil di depan” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2018)

Informan 1 selaku Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan Bappeda Kota Semarang membenarkan hal tersebut dengan memberikan pendapat berikut

“Pak Walikota menginginkan Semarang Smart City ini menjadi role model bagi daerah lain. Oleh karenanya OPD di Kota Semarang dituntut untuk terus berinovasi. Hasilnya itu kita beberapa kali menjadi volunteer bagi daerah lain, daerah lain itu banyak yang mencontoh kita. (Hasil wawancara tanggal 23 Juli 2018)

Sedangkan pendapat lain diberikan oleh Informan 5 selaku akademisi Semarang *Smart City* dan dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro berikut

“Saya rasa benar kalau masyarakat umum hanya berkontribusi sebagai pengguna atau konsumen Smart City ini ya. Karena memang kalau masyarakat itu tidak terlalu dilibatkan dalam pembuatan kebijakannya, ya tidak apa-apa. Keberadaan mereka seharusnya sudah diwakilkan melalui anggota DPRD maupun pemerintah.” (Hasil wawancara tanggal 25 Juli 2018)

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan adanya kontribusi yang tidak sama terhadap masing-masing aktor kebijakan, sehingga aktor kebijakan memiliki porsi kontribusinya masing-masing. Pemerintah Kota Semarang sebagai aktor *state* memiliki kontribusi lebih jika dibandingkan dengan masyarakat maupun swasta dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan program Semarang *Smart City*. Kontribusi itu dapat dilihat dari keterlibatan secara langsung Pemerintah Kota Semarang dalam merumuskan kebijakan dan program Semarang *Smart City*. Adanya tuntutan untuk terus berinovasi dan menjadi yang terbaik menjadi faktor pendorong setiap OPD Kota Semarang untuk terus berkontribusi langsung. Tujuan Pemerintah Kota Semarang untuk menjadi role model *Smart City* bagi daerah lain

juga turut menjadi dorongan yang nyata bagi Pemerintah Kota Semarang untuk terus memberikan kontribusi terbaiknya.

Tingkat kemauan aktor untuk terlibat (*willingness to engage*) dan keperluan aktor untuk terlibat (*necessity of involvement*) dalam proses kebijakan digambarkan oleh Informan 2 selaku Kasi Layanan Manajemen Data Diskominfo Kota Semarang berikut

“Saya rasa sudah jelas ya, karena ini merupakan program pemerintah, ya mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa tidak terpaksa, kita harus terlibat aktif.” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2018)

Informan 1 selaku Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan Bappeda Kota Semarang membenarkan hal tersebut dengan memberikan pendapat berikut

“Kami harap pemerintah dapat proaktif terhadap Semarang Smart City ini. Namun, yang saya takutkan justru mindset atau perilaku, karena yang tadinya manual sekarang menggunakan media elektronik, dan itu butuh waktu. Mengenai tingkat pemahaman masing-masing orang kan berbeda. Pada intinya ketika mereka menerapkan hal tersebut mereka merasa diuntungkan, proses itu menjadi lebih cepat.” (Hasil wawancara tanggal 23 Juli 2018)

Pendapat serupa juga diberikan oleh pihak swasta dan masyarakat melalui informan 4 dan 5. Menurut Informan 4 selaku *Manager of Software Department* Dinustek, seluruh elemen yang ada di Kota Semarang harus menjalankan dan mendukung penuh program Semarang *Smart City* melalui wawancara berikut

“Karena ini hajat Pemerintah Kota Semarang, saya berharap seluruh elemen yang ada di Kota Semarang untuk mendukung penuh program tersebut” (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2018)

Sedangkan Informan 5 selaku akademisi Semarang *Smart City* dan dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro memberikan pernyataan berikut

“Ini program yang baik. Contohnya Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Bu Risma ya, menjadikan Kota Surabaya yang tadinya terkesan kumuh dan tidak tertata menjadi rapih, bersih, dan sangat tertata sekali. Bukan cuma tata kelola wilayahnya, bahkan hingga pemerintahan dan warganya sangat diperhatikan oleh beliau. Saya harap Pemerintah Kota Semarang mampu meniru kebaikan Kota Surabaya dan melebihi Kota Surabaya. Saya rasa ketika masyarakat dihadirkan program yang baik, pemimpin yang baik, masyarakat akan mendukung pemerintahan tersebut. Bukan karena terpaksa, tapi karena cinta terhadap kotanya.” (Hasil wawancara tanggal 25 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Semarang diharapkan untuk tetap proaktif walaupun sudah menjadi sebuah keharusan untuk menjalankan program Semarang *Smart City*. Disamping itu, dukungan dari masyarakat dan swasta juga dibutuhkan dalam rangka kesuksesan program tersebut. Namun muncul sebuah kekhawatiran yang sangat bersinggungan dengan pelaksanaan program dan perumusan kebijakan Semarang *Smart City*, yaitu adanya perubahan mindset dan perilaku pemerintah dan masyarakat yang semula menggunakan media manual menjadi terkomputerisasi dan digital. Peran proaktif pemerintah sangat diperlukan guna menangkal kekhawatiran tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa orientasi nilai masing-masing aktor berbeda dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Pemerintah Kota Semarang memiliki nilai kontribusi, kemauan untuk terlibat (*willingness to engage*), dan keperluan untuk terlibat (*necessity of involvement*) yang lebih besar jika dibanding dengan aktor lainnya. Hal ini wajar jika dilihat, dimana Pemerintah Kota Semarang

merupakan aktor utama dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program Semarang *Smart City*. Meskipun begitu, pemerintah tetap mengharapkan dukungan swasta maupun masyarakat dalam rangka meraih kesuksesan Semarang *Smart City*.